

**PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI PUSDIK ZENI
KODIKLAT TNI AD DALAM RANGKA MENDUKUNG
OPERASI MILITER SELAIN PERANG**

**THE DEVELOPMENT OF EDUCATION CURRICULUM IN PUSDIK ZENI
KODIKLAT TNI AD IN THE MEAN OF SUPPORTING MILITARY
OPERATIONS OTHER THAN WAR**

Rachmat Setiawibawa

Program Studi Strategi dan Kampanye Militer Fakultas Strategi Pertahanan

Abstract - The research raises about the Education Curriculum Development in the Education Center of the Army Engineers Kodiklat to Support Military Operations Other Than War (MOOTW). It is based on the phenomena of persistence of the lack of knowledge and skills of the soldiers Engineers either individually or in association units associated with the main task the Education Center of the Army Engineers as institutions that educate and train the soldiers of Engineers and is still taking place obstacles in the field whether they are administrative, technical and operational in support of the task MOOTW. Research questions, namely: How can Curriculum Development and how efforts to realize development of Curriculum Development in institutions of Engineers Education Centre Kodiklat Army so that soldiers and units of Engineers to support the task of Military Operations Other Than War optimally.

Theories and concepts used to analyze the research problem, namely the theory of Strategy, Organization, Synergy, Human Resources, Curriculum Development and MOOTW. The research method uses a qualitative method of collecting data through observation, interviews, and literature.

The results showed that the Education Center of the Army Engineers Kodiklat Army has been carrying out educational programs in accordance with the current curriculum. In general, the curriculum used today is more oriented to the tasks of Military Operations To War (OMP), while oriented curriculum MOOTW tasks are still very limited. By looking at phenomena and task demands today and in the future, it is expected that their addition and refinement of the subject matter that relates specifically to the tasks MOOTW so as to address issues faced by soldiers and units of Engineers in the field ,

Conclusions from this research is the need for curriculum development in the Education Center of the Army Engineers which is implemented in the form of revising the existing curriculum by adding and refining the material Engineers branches directly related to the duties MOOTW at various levels of existing relevant and continuous with the task at hand or by making courses specifically related to the tasks MOOTW so as to improve the knowledge and skills of soldiers and units of Engineers in support MOOTW task.

Keywords: Strategy, Curriculum Development, Synergy

Abstrak - Penelitian ini mengangkat tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat untuk Mendukung Operasi Militer selain Perang (MOOTW). Hal ini didasarkan pada fenomena ketekunan kurangnya pengetahuan dan keterampilan para Insinyur tentara baik secara individu maupun dalam unit asosiasi yang terkait dengan tugas pokok Pusat Pendidikan Insinyur Angkatan Darat sebagai institusi yang mendidik dan melatih para prajurit Insinyur dan masih terdapat hambatan di lapangan apakah mereka bersifat administratif, teknis dan operasional dalam mendukung tugas MOOTW. Pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana Pengembangan Kurikulum dan bagaimana upaya mewujudkan pengembangan Kurikulum Pembangunan di instansi Pusat Pendidikan Insinyur Angkatan Kodiklat sehingga tentara dan satuan Insinyur mendukung tugas Operasi Militer selain perang secara optimal. Teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa masalah penelitian, yaitu teori Strategi, Organisasi, Sinergi, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kurikulum dan MOOTW. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan literatur.

Hasilnya menunjukkan bahwa Pusat Pendidikan Angkatan Darat Angkatan Darat Kodiklat Angkatan Darat telah melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum saat ini. Secara umum, kurikulum yang digunakan saat ini lebih berorientasi pada tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP), sedangkan kurikulum yang berorientasi pada tugas MOOTW masih sangat terbatas. Dengan melihat fenomena dan tuntutan tugas hari ini dan ke depan, diharapkan penambahan dan penyempurnaan materi pokok yang terkait secara khusus dengan tugas MOOTW sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi tentara dan satuan Insinyur di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan kurikulum di Pusat Pendidikan Insinyur Angkatan Darat yang diimplementasikan dalam bentuk merevisi kurikulum yang ada dengan menambahkan dan menyempurnakan materi cabang Insinyur yang terkait langsung dengan tugas MOOTW pada berbagai tingkatan yang ada terkait dan berkesinambungan atau dengan membuat kursus yang secara khusus terkait dengan tugas MOOTW, sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentara dan satuan Insinyur dalam mendukung tugas MOOTW.

Kata kunci: Strategi, Pengembangan Kurikulum, Sinergi

Pendahuluan

Sebelum masa reformasi, implementasi tugas pokok yang dilaksanakan TNI adalah melaksanakan tugas Dwi Fungsi dimana TNI yang pada saat itu masih ABRI, selain berperan dibidang pertahanan dan keamanan juga berperan dalam bidang sosial politik bahkan cenderung masuk kedalam ranah politik praktis. Hal inilah yang telah menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan karena berdampak pada

dominasi Militer dalam bidang Pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, pelibatan militer hampir masuk di semua wilayah Pemerintahan. Dengan bergulirnya reformasi, menyadarkan kita untuk segera menata kembali tugas-tugas TNI terutama setelah berpisah dengan Polri sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor

VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Buku Putih (2014:47) dijelaskan bahwa dalam situasi damai atau kondisi keamanan nasional dengan spektrum konflik intensitas rendah, TNI dilibatkan dalam penyelenggaraan OMSP, dimana pelaksanaannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam situasi keterbukaan saat ini, implementasi pelaksanaan OMSP relatif lebih sulit jika dibanding dengan masa lalu karena OMSP saat ini merupakan tugas politik yang lebih sulit untuk diukur keberhasilannya, tidak mudah untuk menentukan kapan dimulai dan selesainya serta menentukan batasan yang jelas tentang situasi bagaimana militer dapat dilibatkan. Dalam mengatasi ancaman yang bersifat sosial seperti penanggulangan bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, TNI dapat langsung bertindak sambil menunggu kebijakan dan keputusan politik negara. Sesuai dengan Undang-undang TNI No 34 Tahun 2004 Bab I pasal 8, bahwa TNI-AD, sebagai bagian dari TNI memiliki tugas

untuk melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Beberapa kegiatan skala besar yang melibatkan satuan TNI pada umumnya dan TNI-AD pada khususnya termasuk didalamnya pelibatan satuan-satuan Zeni saat ini yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas pokok OMSP antara lain adalah mengatasi pemberontakan bersenjata, pengiriman pasukan penjaga perdamaian, Operasi Pengamanan VVIP dan Tamu Negara, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu tugas Pemerintahan

Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan TNI dalam mendukung dan melaksanakan tugas OMSP tersebut telah

mengangkat nama baik TNI baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia dan dunia luar terhadap TNI cukup baik. Namun disisi lain, kebanggaan kita ini tidak boleh berlebihan karena tantangan tugas ke depan akan semakin rumit dan kompleks, oleh karena itu kita perlu melaksanakan evaluasi dan introspeksi terhadap kekurangan yang ada baik yang sifatnya eksternal maupun internal atau yang sifatnya operasional maupun administrasi. Misi OMSP memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang agak berbeda dengan misi OMP, Implementasi OMSP sering menghadapi tantangan yang unik, berbeda dengan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi musuh bersenjata saat perang. Seperti kasus bencana alam yang sama di wilayah yang berbeda mengharuskan teknik operasi yang berbeda. Kasus-kasus terorisme yang terjadi mempunyai aksi yang berbeda-beda, demikian juga halnya dengan separatisme yang sangat terkait dengan kondisi geografis dan sosial kultural. Beberapa diantara tugas-tugas tersebut di atas, terdapat tugas-tugas yang belum disiapkan

dan tidak diprediksi jauh sebelumnya oleh TNI seperti kegiatan Operasi Bhakti Kartika Jaya, program Ketahanan Pangan, PJPPK (Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan, JIPPJA (Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan dan Jalur Administrasi), Operasi Perkarantinaan Hewan & Tumbuhan setra Pengawasan Keamanan Hayati dan pembuatan Blocking Canal.

Harus diakui bahwa pelibatan TNI-AD dalam tugas-tugas di atas tidak direncanakan sebelumnya sehingga TNI-AD khususnya satuan-satuan Zeni tidak disiapkan dan dilatihkan secara khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelibatan tugas tersebut muncul sebagai dampak dari keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi oleh instansi terkait didalam menyelesaikan dan mengeksekusi permasalahan yang ada di lapangan. Meskipun tugas yang dilaksanakan satuan-satuan Zeni masih dalam koridor fungsi Zeni, namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi oleh satuan-satuan Zeni baik yang bersifat administrasi (manajemen, legalitas dan bentuk kerja sama) maupun yang bersifat operasional (organisasi,

kemampuan dan keterampilan personel, pengerahan pasukan serta peralatan).

Namun TNI sebagai bagian dari komponen bangsa tentunya tidak bisa membiarkan kesulitan itu terjadi, sehingga TNI-AD dalam hal ini satuan Zeni dilibatkan dalam membantu tugas tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa gangguan ketahanan pangan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Permasalahan sosial seperti konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas yang tinggi, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengakibatkan pemberontakan ataupun gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Semuanya itu dilakukan bukan hanya sebagai wujud kepedulian TNI dalam mendukung program Pemerintah namun merupakan amanah dari UU.

Oleh karena itu, TNI perlu mempertimbangkan berbagai langkah dan penyesuaian dalam rangka menyikapi perkembangan yang merupakan tantangan dan ancaman terhadap sistem pertahanan negara. Salah satu wujud antisipasi strategis yang harus dilakukan adalah

dengan meningkatkan pemahaman bahwa perkembangan global saat ini telah menghadirkan hakikat ancaman yang kompleks antara ancaman militer dan ancaman nir militer. Pendekatan pertahanan ke depan memerlukan pendekatan yang terpadu antara pendekatan secara militer dan nir militer. Dengan demikian, pembangunan postur pertahanan harus dilaksanakan secara bersama-sama sehingga menghasilkan suatu kekuatan pertahanan yang memiliki efek penangkal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI (Buku Putih 201).

Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, pengertian Pengembangan Kurikulum sesuai pernyataan beberapa ahli adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu sehingga mampu menghasilkan suatu produk kurikulum yang lebih baik yang dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi saat ini dan akan datang.

Dengan asumsi bahwa Kurikulum yang dilaksanakan di Pusdik Zeni TNI-AD belum sepenuhnya bisa menjawab

kebutuhan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, maka penulis memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang ada di Pusdik Zeni sehingga mampu menjawab tantangan tugas ke depan dengan mengacu pada teori tentang pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh H. Abdullah Idi. Selanjutnya, penjelasan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar disampaikan seperti pada gambar 2.1 tentang Kerangka Pemikiran Penelitian pada halaman berikut.

Metodologi Penelitian

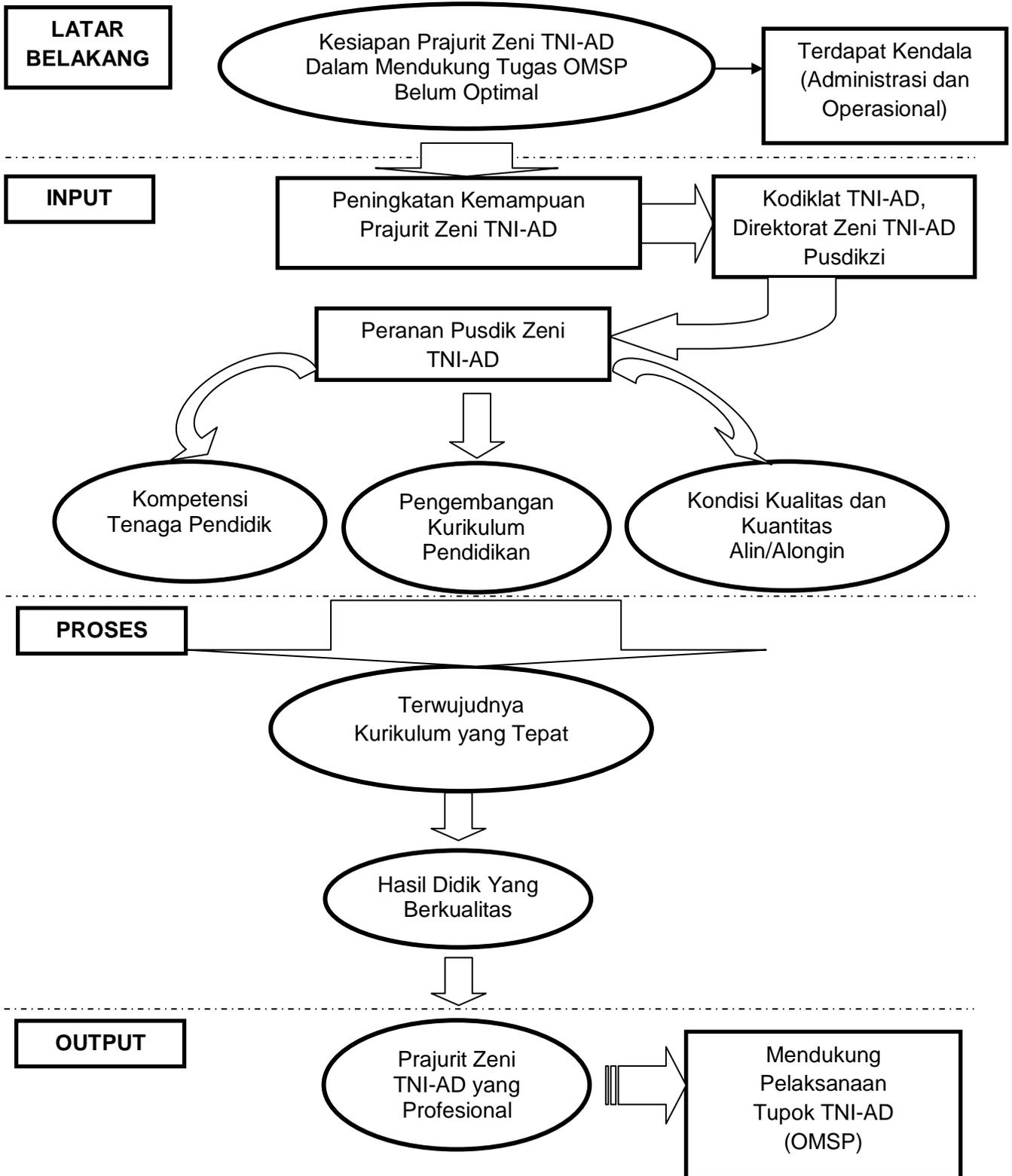
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2014:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2014:19) adalah

obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

Penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan data secara langsung baik berupa data tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mendapatkan data tertulis dilaksanakan dengan mendatangi lembaga yang berkaitan dengan penelitian yaitu Kodiklat TNI-AD, Direktorat Zeni TNI-AD dan Pusdizi Kodiklat TNI-AD sedangkan untuk data tidak tertulis dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para narasumber yang direncanakan. Apabila ternyata narasumber tidak dapat dihubungi, maka peneliti mencoba menghubungi narasumber lain yang relevan dan dipandang memiliki otoritas tinggi untuk memberikan informasi terkait topik penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Analisa Dan Pembahasan

Analisa Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan beberapa sumber diperoleh informasi bahwa dari penjelasan Kolonel Kav Gathut Setyo (Paban III/Wanwil) bahwa beberapa kerja sama yang dilaksanakan TNI dengan Kementrian terkait saat ini seperti Kementrian Pertanian merupakan implementasi dari tugas OMSP dalam rangka membantu pemerintah. Bentuk kerja sama tersebut diwadahi dalam MOU untuk tingkat Mabes TNI dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk tingkat Mabasad, sehingga secara legalitas formal dapat dipertanggung-jawabkan. Tugas TNI dalam kerja sama tersebut adalah melaksanakan program pengawalan dan pendampingan kegiatan Upaya Khusus padi, jagung dan keledai dimana TNI mengerahkan segenap potensi yang ada di kewilayahan untuk bekerja sama dengan Kementrian Pertanian. Pertimbangan dilaksanakannya kerja sama ini adalah karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Kementrian Pertanian didalam mengoptimalkan program percepatan swasembada pangan yang

dicanangkan Pemerintah. Kendala dalam penyerapan gabah petani, distribusi pupuk, irigasi dan terbatasnya lahan pertanian merupakan beberapa faktor penghambat terwujudnya program swasembada pangan dan masalah tersebut senantiasa berulang setiap tahun sehingga diharapkan dengan adanya kerja sama dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian. Disisi lain, bagi TNI sendiri pelibatan dalam tugas ketahanan pangan terutama dalam proses pengawalan dan pendampingan serta pembuatan cetak sawah termasuk dalam kerja sama dukungan operasi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan hayati di wilayah perbatasan darat merupakan hal yang baru sehingga didalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala baik yang berkaitan dengan administrasi maupun operasional termasuk keterbatasan pengetahuan dari personel TNI sendiri. Oleh karena itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh TNI berupa pembekalan dan pelatihan terhadap lebih kurang 30.000 Babinsa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi para pendamping yang akan bertugas di lapangan sehingga dapat melakukan tugas membantu para

penyuluh pertanian dan membina para petani. Sejalan dengan tugas ini jajaran Komando Kewilayahan membantu dalam mengawasi distribusi pupuk dan benih bersubsidi agar dapat diterima para petani secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat tempat. Khusus untuk program cetak sawah, walaupun secara teknis, kemampuan penggunaan alat berat sudah dipahami oleh TNI dalam hal ini personel dan satuan Zeni, namun karena pembuatan sawah merupakan hal baru bagi TNI, maka personel dan satuan Zeni tetap membutuhkan pengetahuan tambahan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan tentang manajemen, Amdal, ilmu tanah, irigasi dan lain-lain. Oleh karena itu, disarankan agar dalam mengantisipasi

berbagai dinamika dan tantangan tugas ke depan terutama yang berkaitan dengan tugas OMSP, perlu adanya terobosan dalam proses pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan sehingga prajurit di lapangan akan lebih siap dan profesional.

Berikut ini data tentang program cetak sawah yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Tabel 4.2

Data Program Cetak Sawah T.A. 2015

No	DAERAH	LUAS
1	Kab. Merauke Prov. Papua	10.000 Ha
2	Kab. Bangka Barat Prov.Babel	1.000 Ha
3	Kab. Bangka Selatan Prov.Babel	2.000 Ha
4	Kab. Bangka Timur Prov.Babel	1.000 Ha
5	Kab. OKI Prov.Sumsel	1.000 Ha
6	Kab. Merangin Prov. Jambi	1.000 Ha
7	Kab. Pinrang Prov. Sulsel	1.000 Ha

8	Kab. Wajo Prov. Sulsel	2.000 Ha
9	Kab. Bombana Prov. Sultra	1.000 Ha
10	Kab. Mesuji Prov. Lampung	1.000 Ha
11	Kab. Bima Prov. NTB	1.000 Ha
12	Kab. Sanggau Prov. Kalbar	1.000 Ha
	Jumlah	23.000 Ha

Sumber : Diolah peneliti (2016)

Selanjutnya berkaitan dengan pelibatan personel dan satuan Zeni, hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Kolonel Czi Suwandi (Kasubditbincab) dijelaskan tentang pelibatan satuan-satuan Zeni baik dalam tugas OMSP di dalam negeri maupun luar negeri dan permasalahannya. Pelibatan satuan Zeni dalam tugas OMSP tidak terlepas dari implementasi 9 (sembilan) kemampuan Zeni sehingga secara teknis dapat mewadahi dan mendukung tugas-tugas yang dihadapi dalam OMSP. Memang saat ini permintaan pelibatan satuan Zeni dari komado atas untuk mendukung tugas-tugas OMSP sangat banyak baik untuk tugas OMSP di dalam negeri maupun negeri. Untuk tugas operasi perdamaian di luar negeri, hampir setiap tahun satuan Zeni selalu dilibatkan, dimana fokus kegiatannya selain dalam tugas pengamanan juga dalam tugas konstruksi,

membantu Enginer Section (ES) dalam aspek Zeni, menyiapkan Camp Militer dan sarana pendukungnya, perbaikan pelabuhan, dermaga dan aliran sungai secara terbatas, perbekalan air, bantuan Zeni kepada UN Security and Stabilization Support Strategy (UNSSSS), Jihandak secara terbatas dan tugas Zeni lainnya dari FHQ (Force Head Quarter). Permasalahan yang ada terletak pada keterbatasan alat, kemampuan personel dan perkembangan teknologi yang masih ketinggalan. Sedangkan untuk penugasan OMSP di dalam negeri, pelibatan satuan Zeni cukup dominan dan bervariasi, sehingga meskipun 9 (sembilan) kemampuan Zeni masih dianggap relevan untuk menjawab tugas tersebut, namun diperlukan beberapa penyesuaian terhadap tugas yang diberikan. Disini kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi dari para Dansat sangat dibutuhkan karena memang

terdapat hal-hal baru yang pada saat pendidikan di Pusdikzi tidak diberikan. Seperti kegiatan pembangunan jalan dalam skala besar di daerah Kalimantan dan Irian, pembuatan Canal maupun dalam kegiatan cetak sawah yang membutuhkan kreatifitas dan inovasi yang tinggi dari para Dansat sehingga dapat menjawab permasalahan baik yang bersifat administrasi, teknis maupun operasional. Untuk tingkat Direktorat, hal yang paling penting adalah

kemampuan dan ketelitian Direktorat sebagai Staf pelaksana teknis, dalam memberikan saran dan masukan terhadap komando atas dengan teliti dan tepat terutama yang berkaitan dengan masalah MOU sehingga secara legal formal dapat dibenarkan.

Berikut ini data tentang penugasan satuan Zeni dalam rangka OMSP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015

Tabel 4.3
Data Penugasan Satuan Zeni TNI-AD Dalam Rangka OMSP
TA 2014 SD 2015

NO	KEGIATAN	2014	2015
I	DALAM NEGERI		
1	UP4B (Usaha Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat)	- Yon Zipur- 4 - Yon Zipur -5 - Yon Zipur -8 - Den Zipur -10 - Den Zipur -11	
2	OBKJ (Operasi Bhakti Kartika Jaya)	- Yon Zipur -12 - Yon Zipur -14	
3	PJPPK (Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan)		- Yon Zipur -2 - Yon Zipur -3 - Yon Zipur -9 - Yon Zipur -11 - Yon Zipur -13 - Yon Zipur -14

4	JIPPPA (Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan Jalur Administrasi)		- Yon Zipur -3 - Yon Zipur- 9
6	Block Canal (Dalam rangka mengatasi bencana kebakaran hutan)		Yon Zipur - 2 - Yon Zipur- 12 - Den Zipur- 8
7	Cetak Sawah		-Yon Zikon 12 -Direktorat Zeni
II	PENUGASAN LUAR NEGERI		
1	SATGAS KIZI TNI KONGO	- Den Zipur – 5	- Yon Zikon - 10
2	SATGAS KIZI TNI AFRIKA TENGAH	- Den Zipur – 6	Yon Zipur - 1

Sumber : Diolah peneliti (2016)

Berkaitan dengan implementasi di lapangan tentang peran maupun pelibatan satuan Zeni dalam tugas OMSP baik di dalam maupun di luar negeri, peneliti melakukan wawancara dengan Letnan Kolonel Irfan Sidik (mantan Danyon Zipur 9/1 Kostrad). Beliau pernah bertugas sebagai Dansatgas Kompi Zeni di Kongo dan juga sebagai Dansatgas dalam tugas operasi PJPPK (Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan), membantu penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Banjar Negara dan Tanggap Darurat Jalur Pantura). Dari hasil wawancara bahwa dalam menghadapi tantangan tugas-tugas OMSP ke depan, satuan Zeni dituntut untuk selalu menyiapkan dirinya secara baik dengan meningkatkan kemampuan dan

keterampilan personel serta kesiapan material dan peralatan. Selain itu, satuan Zeni dituntut untuk mampu untuk memprediksi tugas-tugas yang dihadapi ke depan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan tidak terlepas dari masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan personel serta kondisi peralatan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Namun demikian, hal-hal yang sifatnya non teknis tetap memerlukan perhatian khusus karena dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan, masalah non teknis sering menjadi kendala yang cukup merepotkan. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada, dinamika di lapangan serta improvisasi

dalam manajemen proyek yang tidak terdapat di bangku sekolah perlu menjadi bahan kajian, sehingga dapat menjadi masukan didalam proses pendidikan dan pelatihan di Pusdikzi. Dari pengalaman tugas di lapangan baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri, terdapat hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan di pendidikan maupun dilatihkan di satuan sehingga hal ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi satuan Zeni. Hal tersebut diperkuat oleh Lettu Czi Aminto (Danton Satgas Kizi TNI KONGA XX-J Monusco) bahwa dalam melaksanakan tugas OMSP, secara umum dapat diwadahi dengan 9 (sembilan) kemampuan Zeni, namun dalam beberapa kasus terdapat hal-hal baru yang perlu pembelajaran lebih lanjut seperti dalam pembuatan jalan menggunakan konstruksi *limonite* (tanah dengan struktur 90 % batu kerikil dan bercampur tanah) masih sangat terbatas sehingga diawal pekerjaan mengalami kesulitan dalam mencari mekanisme pekerjaan yang tepat dikaitkan dengan target pencapaian volume pekerjaan dan target waktu pekerjaan. Hambatan lain adalah dalam hal penentuan *quary limonte* yang kualitas bagus

dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan tentang *limonite*. Dalam pembangunan jembatan jenis Acro Panel membutuhkan penyesuaian karena baru mengenal Acro Panel saat di daerah misi termasuk dalam pemasangan *RaffHall* dengan konstruksi baja butuh penyesuaian karena merupakan materi baru yang dihadapi oleh anggota. Begitu pula dengan yang dialami oleh Lettu Czi Bobby Andrias (Danton Satgas yang terlibat dalam PJPPK, Penanggulangan kebakaran hutan di Riau, Tanggap Darurat Jalur Pantura). Disampaikan bahwa dalam beberapa pekerjaan terdapat beberapa kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Misalnya dalam operasi PJPPK, banyaknya permasalahan non teknis yang berhubungan dengan kebudayaan setempat yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar diantaranya penolakan masyarakat terhadap pembangunan jalan paralel yang terkena tanah adat suatu desa. Terbatasnya kemampuan operator karena jam terbang yang dimilikinya masih sangat terbatas, sementara di lapangan dituntut kemampuan operator yang siap pakai. Selain itu terbatasnya fasilitas alat angkut

air untuk mendukung pergeseran peralatan dan logistik yang semuanya ini memerlukan kreatifitas dan inovasi dari Dansat. Dalam penanggulangan kebakaran, peralatan dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota sangat terbatas sekali dimana peralatan yang ada kurang sesuai untuk digunakan penanggulangan kebakaran dengan skala besar dan anggota tidak memiliki pengetahuan tentang teknis pemadaman api yang benar. Demikian halnya dengan operasi Tanggap Darurat Jalur Pantura dimana pengetahuan dan keterampilan prajurit Zeni dalam perbaikan jalan masih sangat terbatas karena materi yang diberikan di pendidikan lebih mengarah kepada teknik pembangunan jalan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dari Satgas selama ini tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas dan inovasi serta koordinasi dari Dansat di lapangan.

Pembahasan

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan di Pusdik Zeni Kodiklat TNI-AD dan upaya untuk mewujudkan pengembangan kurikulum pendidikan dalam rangka mendukung OMSP dengan mencermati hasil penelitian yang sudah

dilaksanakan. Pembahasan dilaksanakan melalui analisis data dikaitkan dengan teori tentang pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed (2011). Untuk melengkapi dan menyempurnakan analisis ini maka dalam akan didukung dengan tinjauan pustaka lainnya sehingga diharapkan hasil analisis dalam penelitian ini akan lebih komprehensif.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Peran TNI pada OMSP dan permasalahannya.

Kerja sama yang dilaksanakan TNI dengan beberapa Kementrian baik dalam membantu tugas-tugas pemerintah, penanggulangan bencana alam dan lain-lain merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam rangka OMSP. Bentuk kerja sama tersebut diwadahi dalam suatu perjanjian kerja sama atau MoU sehingga secara legalitas formal dapat dipertanggung-jawabkan. Pertimbangan dilaksanakan kerja sama ini adalah karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah didalam mengoptimalkan progam Pemerintah dan disisi lain TNI memiliki kapasitas potensial yang bisa dilibatkan baik berupa sumber daya

manusia maupun peralatan sehingga pelibatan TNI menjadi salah satu alternatif penyelesaian.

Diantara beberapa tugas bantuan tersebut, terdapat beberapa penugasan yang relatif baru sehingga didalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala baik yang berkaitan dengan administrasi, operasional maupun manajemen. Langkah TNI yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memberikan pembekalan dan pelatihan kepada lebih kurang 30.000 Babinsa merupakan indikasi adanya permasalahan tersebut. Demikian halnya yang alami oleh satuan-satuan Zeni pada saat melaksanakan Operasi Bhakti Kartika Jaya, UP4B, PJPPK, JIPPJA, Operasi Perdamaian Dunia, pembuatan Blocking Canal yang dilaksanakan oleh satuan-satuan Zeni, meskipun secara teknis kemampuan Zeni dapat diimplementasikan dalam mendukung tugas-tugas tersebut namun terdapat beberapa kendala-kendala baik pengetahuan dan keterampilan yang pada saat pendidikan di Pusdikzi tidak diberikan. Oleh karena itu kemampuan dari para Dansat untuk berinovasi dan berkreasi sangat dibutuhkan dan yang lebih penting

lagi adalah adanya terobosan dalam proses pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan sehingga prajurit di lapangan akan lebih siap dan profesional.

Berkaitan dengan implementasi peran dan pelibatan satuan Zeni dalam tugas OMSP serta permasalahannya, bahwa dalam menghadapi tantangan tugas-tugas OMSP ke depan, satuan Zeni dituntut untuk meningkatkan kemampuan personel dan kesiapan peralatannya, mampu memprediksi tugas-tugas ke depan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada, dinamika di lapangan serta improvisasi dalam manajemen proyek perlu menjadi bahan kajian dan evaluasi, sehingga dapat menjadi masukan didalam proses pendidikan dan pelatihan di Pusdikzi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya penyesuaian dalam proses pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan terutama yang menyangkut materi-materi yang harus diberikan sehingga peran yang akan dilaksanakan TNI pada OMSP dan

permasalahannya dapat diwadahi dalam kurikulum yang ada. Disinilah perlunya pengembangan kurikulum sebagai alternatif untuk menjawab peran TNI pada OMSP.

Merujuk pada teori Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh H. Abdullah Idi (2001) bahwa dalam melaksanakan pengembangan kurikulum harus ada relevansi antara materi yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa datang. Dalam teori juga dijelaskan bahwa peranan kreatif dan konstruktif dari sebuah kurikulum adalah untuk menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang dalam masyarakat yang secara sosiologis harus mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu dan kebutuhan dari masyarakat. Dengan demikian maka peran TNI dalam melaksanakan OMSP adalah dalam rangka mendukung pemerintah sehingga didalam pelaksanaannya harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan tugas dan bersinergi dengan Instansi yang dibantu.

Keterkaitan OMSP dengan Pengembangan Kurikulum.

Dalam menyikapi tuntutan tugas ke depan khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas OMSP, pimpinan TNI-AD melihat bahwa kepercayaan pemerintah terhadap TNI khususnya TNI-AD semakin meningkat, indikasinya dapat dilihat dari semakin banyaknya kerja sama yang dilaksanakan oleh TNI-AD dengan beberapa Kementrian dan kesinambungan dari kerja sama tersebut. Bagi TNI, sudah menjadi komitmen dan semangat TNI untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Konsekwensinya adalah TNI harus menyiapkan dirinya, prajurit-prajurit dan satuan-satuan yang profesional sehingga mampu dan melaksanakan tantangan tugas ke depan. Fakta menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas OMSP, karena sifat uniknya, tugas tersebut memerlukan pengetahuan dan keterampilan serta peralatan yang khusus, sehingga diperlukan suatu model dan strategi yang tepat dengan berorientasi pada tujuan tugas kedepan. Upaya yang dilaksanakan TNI-AD adalah dengan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah

dan sedang berjalan, melakukan kajian-kajian untuk mencari alternatif tentang perlunya pendidikan khusus yang berkaitan dengan materi OMSP. Pertimbangannya adalah pelatihan dan pendidikan titipan yang selama ini dilaksanakan dengan instansi lain masih sangat terbatas karena alokasi peserta didik yang terbatas dan materinya lebih berorientasi pada masalah manajemen. Ke depan, kerja sama TNI dengan Kementerian terkait dalam bidang Diklat akan terus dikembangkan dan diharapkan dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan militer dengan supervisi dan referensi dari Kementerian terkait sehingga kurikulum pendidikan di lingkungan akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan tugas.

Pengembangan kurikulum merupakan alternatif untuk menjawab tantangan tugas ke depan karena dalam pengembangan kurikulum terdapat peluang untuk mengakomodir materi-materi yang belum terwadahi dalam kurikulum. Proses pengembangan kurikulum harus melalui evaluasi dan pengkajian yang mendalam serta tahapan dalam penyusunan kurikulum. Peran Direktorat Zeni dalam mengevaluasi hal-hal

yang menjadi kekurangan dan mencari peluang-peluang lain yang bisa dikembangkan oleh satuan Zeni merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum karena memang Direktorat Zeni memiliki kewenangan tersebut. Revisi kurikulum dapat dilaksanakan dengan menambah materi baru, menambah jam pelajaran yang dianggap memerlukan prioritas atau menyempurnakan materi-materi kecabangan yang ada dikaitkan dengan perkembangan tugas ke depan. Permasalahan yang dihadapi Pusdikzi adalah kemampuan Gadik, kondisi Alin/Alongin dan fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Selain itu faktor waktu pendidikan yang relatif singkat serta kurikulum yang masih berorientasi pada tugas-tugas OMP membuat Pusdikzi belum bisa menjadikan hasil didik dengan kategori menguasai dan mahir dalam menghadapi tugas-tugas OMSP.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara penugasan dalam OMSP dengan pengembangan kurikulum dimana untuk menghasilkan prajurit-prajurit yang profesional, diperlukan adanya penyesuaian materi-materi yang diberikan

di lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan tugas. Disinilah perlunya kurikulum dikembangkan untuk menjawab tuntutan tugas dalam melaksanakan OMSP.

Merujuk pada teori Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh H. Abdullah Idi (2001) bahwa dalam melaksanakan pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel yang memberi kebebasan untuk mengembangkan program pengajaran dengan berorientasi pada tujuan yang ditentukan. Dalam teori juga dijelaskan bahwa peranan kritis dan evaluatif dari sebuah kurikulum adalah bahwa pendidikan tidak hanya berdasarkan sesuatu yang sudah ada namun harus menilai dan memilih materi-materi yang dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya pengembangan kurikulum dapat mewadahi materi-materi yang dibutuhkan dalam OMSP.

Peran Pengembangan Kurikulum dalam meningkatkan profesional prajurit Zeni

Prajurit yang profesional dalam tugas adalah mereka yang mampu berbuat dan bertindak sesuai dengan keahliannya. Keahlian tersebut didapatkan jika apa yang mereka laksanakan adalah apa yang dilatihkan dan apa yang dilatihkan adalah

apa yang diajarkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memegang peranan yang sangat signifikan dalam mendidik dan melatih prajurit menjadi prajurit yang profesional. Permasalahannya adalah bagaimana jika apa yang dihadapi dalam tugas belum sesuai dengan materi yang diberikan di lembaga pendidikan karena bisa jadi orientasi materi di lembaga pendidikan belum mengarah kepada tugas-tugas yang dihadapi saat ini. Dalam menentukan kebijakan tentang revisi kurikulum, yang mendasari pengembangan kurikulum adalah kebijaksanaan pimpinan TNI-AD atau pejabat yang diberi wewenang dan hasil evaluasi dan validasi. Dasar tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang bagi pengambil kebijakan maupun institusi yang diberi kewenangan untuk mengevaluasi, memberikan saran dan masukan bagi pengembangan kurikulum sehingga apa yang dioperasikan di Pusdikzi dapat relevan dan menjawab tugas-tugas ke depan. Hal ini merupakan jawaban bagi lembaga pendidikan untuk lebih siap dalam mendidik dan melatih prajurit Zeni menjadi profesional.

Meskipun secara umum, program pendidikan yang berlangsung di Pusdikzi

sudah sesuai dengan tuntutan tugas, karena memang masing-masing kurikulum sudah ditentukan mulai dari tujuan pendidikan, tugas-tugas keluaran pendidikan, kemampuan keluaran pendidikan dan materi pembekalan sampai dengan kualifikasi lulusan pendidikan. Disisi lain, tuntutan tugas OMSP saat ini cukup dinamis, bervariasi dan memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga menjadi tantangan bagi TNI untuk menyiapkan personel-personelnya secara profesional. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan di atas karena dengan adanya pengembangan kurikulum akan menjadi dasar dalam penyesuaian materi yang diajarkan dengan kebutuhan tugas karena dasar pengembangan kurikulum adalah kebutuhan tugas dan tantangan yang akan dihadapi kedepan serta hasil evaluasi dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya.

Pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam menjawab dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global sehingga SDM dapat bersaing secara kompetitif. Di lingkungan perguruan tinggi,

pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNi yang dirancang dengan menyetarakan antara pendidikan dan pelatihan dengan pekerjaan yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada kurikulum di lingkungan TNI agar prajurit-prajurit TNI dapat bertugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya termasuk mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, psikologis, muatan lokal (*local content*) yang diawali dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Kemampuan yang sifatnya generik perlu dimiliki oleh setiap prajurit, namun kemampuan spesialis perlu dimiliki oleh prajurit-prajurit atau satuan-satuan tertentu sehingga tugas yang sifatnya spesifik dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek filosofis, sosiologis, psikologis, muatan lokal yang diawali dari perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum sangat berperan dalam meningkatkan profesional prajurit. Selain mampu mengakomodir

tugas-tugas perang, pengembangan kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dimana militer terlibat didalamnya. Disinilah peranan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan profesional prajurit Zeni.

Merujuk pada teori Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh H. Abdullah Idi (2001) bahwa dalam melaksanakan pengembangan kurikulum harus efektif dan efisiensi sehingga dengan modal atau biaya, tenaga dan waktu yang ada akan dicapai hasil yang memuaskan dengan hasil yang optimal. Hal tersebut dapat terwujud dengan model pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan cara memperbaiki, memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan dan sudah diketahui hasilnya. Dalam teori juga dijelaskan bahwa proses pembuatan keputusan dalam pengembangan kurikulum diklasifikasikan kedalam dua proses yaitu secara sentralisasi (*top down*) yaitu berdasarkan kebijaksanaan pimpinan TNI-AD atau pejabat yang diberi wewenang dan desentralisasi (*button up*) yaitu berdasarkan hasil evaluasi dan kajian dari satuan bawah. Dengan demikian,

diharapkan hasilnya bisa lebih komprehensif dan profesional karena dapat mewadahi pokok-pokok kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan saran dan masukan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi.

Upaya Mewujudkan Pengembangan Kurikulum.

Kendala yang dihadapi

Menyikapi pokok-pokok keinginan pimpinan TNI khususnya TNI-AD bahwa didalam melaksanakan tugasnya prajurit dituntut untuk bersikap dan bertindak profesional. Pokok-pokok keinginan tersebut harus dijawab oleh para pengambil kebijakan dibawahnya dengan menjabarkannya melalui evaluasi dan pengkajian terutama yang menyangkut penyiapan SDM. Ketentuan yang membuka ruang bagi masing-masing Pusat Kecabangan dan Kesenjataan untuk melakukan evaluasi dan pengkajian merupakan peluang bagi mengembangkan kurikulum. Disisi lain, berbagai dinamika penugasan mengharuskan kita cermat dan cerdas dalam menjawab tantangan tugas. Pengembangan kurikulum merupakan alternatif jawaban sehingga menjadi solusi bagi lembaga pendidikan untuk

menyiapkan prajurit-prajurit yang profesional. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan kurikulum bisa dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum adalah dalam operasional pendidikannya karena disatu sisi kurikulumnya harus dioperasionalkan sedangkan disisi lain pihak Departemen yang menjadi supervisi materi tersebut belum siap menyiapkan hanjarnya, Selain itu, kemampuan Gadik yang paham tentang teknologi terbaru dan alat instruksi yang ada sangat terbatas. Indikasinya bisa dilihat dari prosentasi jumlah Gadik yang memiliki gelar kesarjanaan teknik yang sangat sedikit yaitu kurang lebih 10 %. Demikian juga dengan keterbatasan tempat praktek, Alin/Alongin yang mengharuskan Pusdikzi bekerja sama dengan instansi/satuan lain.

Kendala lain yang dirasakan dalam pengembangan kurikulum adalah belum terintegrasinya mekanisme dari berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum baik yang terkait dengan Litbang dan pengkajian, perumus kebijakan, penyusun revisi dan bagain pengadaan alat peralatan.

Selain kendala-kendala di atas,

dalam penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan hubungan antara lulusan yang akan dihasilkan dengan tuntutan tugas sehingga terdapat kesetaraan hubungan level lulusan dengan pasar kerja. Sistem pendidikan di lingkungan militer memiliki beberapa kesamaan dengan sistem di perguruan tinggi, dimana tingkatan operator, teknis/analisis dan tenaga ahli di lingkungan militer dapat diwadahi dalam pendidikan yang sifatnya berjenjang seperti pendidikan Tamtama, Bintara dan Perwira sehingga setiap jenjang pendidikan dapat mengakomodir materi-materi yang diperlukan dengan harapan pengembangan kurikulum benar-benar bisa menjawab tujuan dari organisasi.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan kurikulum terdapat beberapa kendala yang harus diatasi agar pengembangan kurikulum mampu mengakomodir materi-materi yang diperlukan sehingga mampu menjawab kebutuhan tugas ke depan. Disinilah perlunya mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam upaya mewujudkan

pengembangan kurikulum di lingkungan Pusdikzi.

Merujuk pada teori Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh H. Abdullah Idi (2001) bahwa dalam melaksanakan pengembangan kurikulum harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga adanya keterkaitan antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan dengan mengembangkan komponen-komponen kurikulum (komponen tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar dan lain-lain) untuk membentuk suatu sistem kurikulum yang harus dikembangkan agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Dalam teori juga dijelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus berasaskan aspek psikologis yang akan membantu para pengembang kurikulum untuk lebih realistis dalam memilih tujuan-tujuan. Dengan demikian, diharapkan hasilnya bisa lebih komprehensif karena dapat mewadahi pokok-pokok kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan saran dan masukan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi.

Upaya yang dilaksanakan

Menyikapi kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pengembangan kurikulum, maka perlu adanya langkah-langkah kongkrit yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan tataran kewenangannya. Berdasarkan mekanisme revisi kurikulum dan tataran kewenangan dalam revisi kurikulum, Kodiklat TNI-AD senantiasa memberikan ruang dan kesempatan bagi Pusat Kecabangan dan Kesenjataan untuk melakukan revisi berdasarkan kebijakan pimpinan, hasil kajian, evaluasi dan validasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Pusat Kecabangan atau Kesenjataan dapat menjabarkan pokok-pokok keinginan pimpinan dalam bidang pendidikan termasuk hasil evaluasi yang dilaporkan oleh masing-masing Pusdik selama dan setelah pendidikan berjalan. Diharapkan dengan kerja sama yang sinergi, komprehensif dan terintegrasi serta berorientasi pada tujuan maka proses pengembangan kurikulum bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Direktorat Zeni sebagai salah satu Pusat Kecabangan di lingkungan TNI-AD, senantiasa melakukan pengkajian dan

evaluasi terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh satuan Zeni dimana pengkajian dan evaluasi tersebut tidak hanya ditujukan terhadap materi OMP tapi juga materi OMSP yang saat ini banyak dikerjakan oleh satuan-satuan Zeni. Adanya Alut Sista/Peralatan baru sangat berpengaruh terhadap program pendidikan dan pelatihan di Pusdikzi. Langkah yang dilaksanakan oleh Direktorat Zeni adalah dengan melakukan penataran secara terpusat baik di Direktorat Zeni maupun yang dilaksanakan di Pusdikzi, bersamaan dengan itu pembentukan Pokja untuk merevisi kurikulum tetap berjalan.

Untuk tingkatan Pusdikzi, pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap operasional pendidikan dan pelatihan, materi kurikulum, hasil didik dan lain-lain selalu dilakukan. Langkah implementatif yang berkaitan dengan operasional pendidikan dilaksanakan dengan melaksanakan modifikasi terhadap metode pengajaran dengan audio visual seperti penayangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Zeni pada saat melakukan tugas OMSP termasuk dengan melaksanakan kerja sama berupa praktek di Paspampres, KOMPI Nubika maupun KOMPI

Jihandak untuk memberikan pembekalan tambahan materi yang belum terdapat dalam kurikulum.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa perlu adanya langkah-langkah proaktif untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan melakukan pengembangan kurikulum sehingga mampu mengakomodir materi-materi yang diperlukan untuk tugas ke depan. Disinilah perlunya upaya untuk mewujudkan pengembangan kurikulum di lingkungan Pusdikzi.

Merujuk pada teori Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh H. Abdullah Idi (2001) bahwa dalam melaksanakan pengembangan kurikulum harus dilaksanakan secara efektif sehingga direncanakan dengan baik agar tercapai tujuan yang diharapkan serta fleksibel dalam memilih dan mengembangkan program pengajaran. Dalam teori juga dijelaskan bahwa peranan kurikulum juga harus kritis dan evaluatif yang artinya bahwa pendidikan tidak hanya berdasarkan sesuatu yang sudah ada dan namun harus menilai dan memilih materi-materi yang dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya langkah-langkah tersebut

dapat terwujud pengembangan kurikulum yang mampu mewadahi materi-materi yang dibutuhkan dalam OMSP.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

1. Operasi Militer Selain Perang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas pokok TNI yang dilaksanakan dalam bentuk membantu tugas Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemerintah pada kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI. OMSP bukan merupakan tugas tambahan, tapi merupakan tugas pokok TNI yang pada situasi damai seperti memiliki intensitas dan dinamika yang cukup dominan. Kesiapan prajurit dan satuan dalam menghadapi OMSP harus disiapkan secara optimal dengan menempatkan masing-masing tugas tersebut secara proporsional sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan tingkat eskalasi ancaman.
2. Pelibatan satuan-satuan Zeni dalam mendukung tugas-tugas OMSP cukup signifikan dan mendapatkan apresiasi yang positif baik dari kalangan TNI maupun dari instansi lain terutama dari

instansi lain yang dibantu, namun keterbatasan kemampuan sumber daya manusia baik dari aspek pengetahuan, keterampilan serta alat peralatan utama sangat dirasakan di lapangan, hal tersebut karena pendidikan dan pelatihan yang diberikan di lembaga Pendidikan Zeni belum diberikan secara komprehensif untuk menjawab kendala dan tantangan tugas yang dihadapi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari orientasi dari kurikulum, kesiapan Gadik, kondisi Alin/Alongin, dan komponen pendidikan yang lain lebih menitik beratkan pada tugas-tugas OMP dan belum berorientasi kepada tugas-tugas dalam rangka menghadapi OMSP.

3. Revisi kurikulum merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum, dasar pengembangan kurikulum adalah kebijaksanaan pimpinan TNI-AD atau pejabat yang diberi wewenang dan hasil evaluasi dan validasi. Oleh karena itu pengembangan kurikulum merupakan hal yang sangat mungkin dilakukan. Pengembangan Kurikulum merupakan alternatif kebijakan yang perlu dilakukan sebagai respon dan antisipasi terhadap perkembangan tuntutan perkembangan

teknologi dan tugas TNI saat ini dan dimasa yang akan datang, sehingga personel dan prajurit selalu siap dalam menghadapi tugas yang ada serta mampu mengantisipasi tugas yang akan datang.

4. Pusdikzi sebagai lembaga operasional yang mendidik prajurit-prajurit Zeni memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan hasil didik yang berkualitas namun didalam operasional pendidikan terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek kurikulum, Gadik maupun Alin/Alongin. Keterbatasan kondisi aspek-aspek tersebut berimplikasi terhadap kualitas hasil didik terutama dalam pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan dalam bidang OMSP. Salah satu alternatif dalam mengatasi kendala dan keterbatasan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kurikulum yang ada dengan tetap berorientasi terhadap tugas pokok TNI. Diharapkan dengan adanya pengembangan kurikulum dapat berpengaruh terhadap kesiapan aspek-aspek yang lain dalam mendukung operasional pendidikan.

Saran

Saran Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi dunia akademis terutama yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum di lingkungan TNI-AD pada umumnya maupun Kecabangan Zeni pada khususnya. Disarankan kepada peneliti berikutnya agar dapat meneliti pengembangan kurikulum secara lebih mendalam dikaitkan dengan OMSP.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengembangan kurikulum dengan mengkaji keterkaitan antara materi tugas-tugas OMSP dengan kurikulum yang ada.

Saran Praktis

1. Perlu adanya evaluasi dan kajian terhadap materi-materi yang dilaksanakan dalam OMP sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi dan strategi dalam menyiapkan personel dan satuan yang akan ditugaskan.
2. Perlu adanya kajian yang mendalam terhadap kurikulum yang ada dikaitkan dengan tugas-tugas OMSP, sehingga adanya relevansi antara kurikulum yang

diajarkan dan dilatihkan di lembaga pendidikan dengan tugas-tugas OMSP yang dilaksanakan.

3. Perlu adanya revisi dan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan secara komprehensif terhadap materi-materi OMSP di lembaga pendidikan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian dari pelaksanaan tugas OMSP.
4. Perlu adanya pengadaan dan peningkatan fasilitas pendidikan terutama yang berkaitan dengan sarana praktek seperti daerah latihan untuk praktek materi alat berat, jembatan, jehandak dan lain-lain sebagai tindak lanjut dari pengembangan kurikulum.
5. Perlu adanya kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan personel melalui pendidikan dan pelatihan bersama.

Daftar Pustaka

Buku

- H. Abdullah Idi (2011). Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek. Jogjakarta : Ar Ruzz Media,
- Zaenal Arifin (2012). Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- H. Oemar Hamalik (2009). Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Akdon (2011). Strategic Management For Educational Management. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan kesembilan. Bandung : Alfabeta.
- Satori, D. & Aan K. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arikunto. S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2008). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sondang P. Siagian. MPA (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukiman (2015). *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Gatot Nurmantyo. (2014). *Peran Pemuda Dalam Menghadapi Proxy War*.
- Ismail Solihin. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama..
- Gatot Nurmantyo. (2015). *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas*.
- Dedi Hadian. (2013). *Prilaku Keorganisasian*. Bandung : LoGoZ Publishing.
- Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto (1993) tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Naskah Departemen Sesko TNI “Rencana Kontijensi” (2013) disebutkan bahwa OMSP
- Moeldoko (2015, Oktober). Jakarta “Operasi Militer Selain Perang :

- Sumber atau Solusi Masalah ?". Makalah disampaikan pada Diskusi tentang OMSP
- Kementrian Pertahanan. (2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014. Jakarta : Kementrian Pertahanan
- Robins Stephen P (2002), *Perilaku Organisasi* (terjemahan), Erlangga Jakarta.
- Ivancevich John M., Donelly James H., Gibson James L, *Management Principle and Function*, fourt edition, Richard D. Irwin. Inc. USA.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Covey, S. R. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Jakarta : Sumargi Rahardjo. mgi.
- Usman, H. & Akbar, P. S. (2004). *Metodologi Penelitian Soisal*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Peraturan/Perundang-undangan**
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang *Sisdiknas*
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang *Tentara Nasional Indonesia*
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/31/VIII/2010, tentang *Tugas Pokok Kodiklat TNI-AD*
- Skep Kasad Nomor: Skep/179/VII/2004 (Buku Petunjuk Pembinaan tentang Pendidikan)
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad : 11-02/IV/2011 tentang *Alins/Alongin*
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad : 08-02/IV/2011 tentang *Tenaga Pendidik*.